

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

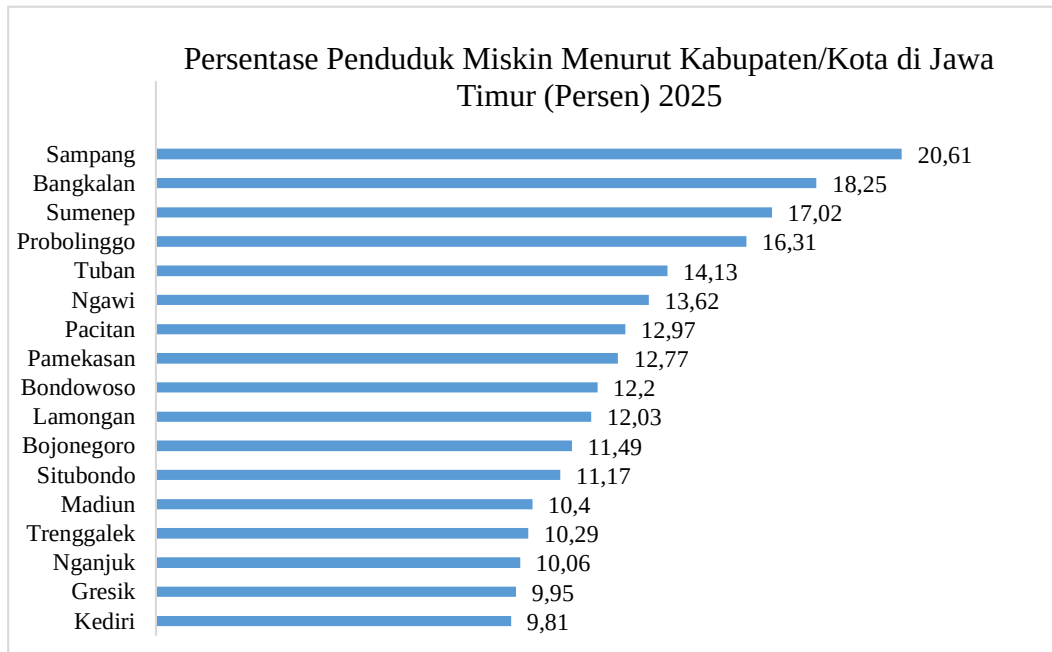
Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar hidup rata-rata yang berlaku di suatu wilayah. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan yang tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat dapat diidentifikasi melalui tingkat kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup yang berlaku (Zuraida & Asmara, 2024).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang hingga kini menjadi tantangan utama di berbagai daerah di Indonesia termasuk di tingkat kabupaten. Tingginya jumlah penduduk miskin mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta rendahnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif (Mukhtar, Saptono, & Arifin, 2019). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi sorotan pemerintah di berbagai negara. Kemiskinan kerap digambarkan sebagai lingkaran yang sulit diputus karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (Firdausy, 2020).

Perspektif pembangunan ekonomi memandang kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan individu tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat struktural seperti struktur perekonomian daerah, ketimpangan distribusi sumber daya, serta keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja dan modal. Teori kemiskinan struktural menekankan bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat dari

sistem dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. (Maulidah & Soejoto, 2023)

Gambar 1. 1 Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber: BPS Bojonegoro (2026)

Jika kita melihat berdasarkan data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan antar wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Beberapa kabupaten khususnya di wilayah Madura, masih menempati posisi dengan persentase penduduk miskin tertinggi seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Sementara itu Kabupaten Bojonegoro tercatat memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,49 persen yang masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih memerlukan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pada tingkat regional keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merepresentasikan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. PDRB dapat diartikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang beroperasi di suatu wilayah atau sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi dalam wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Oleh karena itu laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai indikator utama dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi regional secara riil (Todaro & C.Smith, 2020).

Sukirno (2019) menjelaskan bahwa kinerja perekonomian suatu daerah dapat diidentifikasi melalui laju pertumbuhan ekonomi agregat yang diukur berdasarkan PDRB. PDRB tersebut merupakan rata-rata tertimbang dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Dengan demikian apabila suatu sektor memiliki kontribusi yang signifikan namun mengalami pertumbuhan yang relatif lambat, kondisi tersebut berpotensi menekan atau menghambat laju pertumbuhan ekonomi agregat daerah secara keseluruhan (Darnawaty & Purnasari, 2024). Fenomena tersebut dapat diamati pada perekonomian Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap satu sektor utama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel distribusi PDRB Bojonegoro menurut lapangan usaha berikut

Tabel 1. 1 Distribusi Persentase PDRB Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,18	11,71	10,82	11,93	11,85
Pertambangan dan Penggalian	43,42	50,59	54,29	49,48	47,54
Industri Pengolahan	6,78	6,11	5,69	6,40	6,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	7,76	6,79	6,42	6,92	7,19
Perdagangan Besar dan Eceran	9,02	8,28	7,81	8,67	9,00
Transportasi dan Pergudangan	1,15	1,34	1,23	1,34	1,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,9	0,89	1,01	1,09
Informasi dan Komunikasi	6,77	6,09	5,46	5,99	6,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,54	1,34	1,23	1,34	1,38
Real Estate	1,32	1,15	1,04	1,15	1,17
Jasa Perusahaan	0,15	0,13	0,12	0,14	0,15
Administrasi Pemerintahan	4,48	3,73	3,19	3,37	3,63
Jasa Pendidikan	1,17	1,00	0,85	0,94	0,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,46	0,41	0,37	0,40	0,42
Jasa lainnya	0,74	0,66	0,63	0,74	0,79

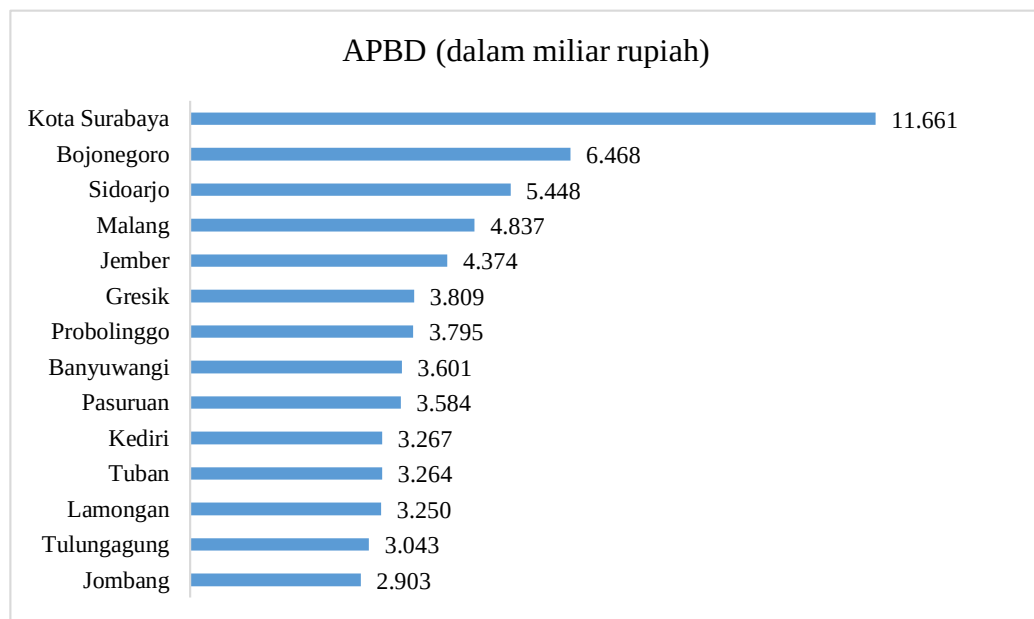
Sumber: BPS Bojonegoro (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah yaitu sebesar 47,54% lalu diikuti oleh sektor pertanian yang menempati posisi kedua yaitu sebesar 11,85%. Akan tetapi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar –2,13 persen. Sebaliknya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya dari sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap PDRB daerah. Selain itu Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar yang tercermin dari besarnya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara teoritis kondisi ini seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi.

Gambar 1. 2 APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025



Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Terlihat pada Gambar 1.2 Kabupaten Bojonegoro memiliki APBD sebesar 6,468 miliar rupiah pada tahun 2025 yang menempatkannya sebagai kabupaten dengan APBD terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Besarnya APBD ini menunjukkan kapasitas fiskal yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain seperti, Sidoarjo dan Malang yang memiliki APBD masing-masing 5,448 miliar rupiah dan 4,837 miliar rupiah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Bojonegoro memiliki potensi keuangan daerah yang kuat untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun potensi fiskal dan kontribusi sektor pertambangan yang dominan memberikan dampak signifikan

terhadap PDRB daerah kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih relatif tinggi. Hal ini mengisyaratkan perlunya pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dan merata serta strategi diversifikasi ekonomi yang mampu mengoptimalkan potensi sektor lain. Khususnya sektor pertanian yang mana menyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor pertanian secara konsisten berkontribusi rata-rata sekitar 15% persen terhadap total PDRB pada tahun 2020-2024. Komoditas pertanian unggulan khususnya padi menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai penghasil terbesar padi terbesar ketiga di Jawa Timur yang mana produksi perkiraan mencapai sekitar 866.915,97 ton gabah kering giling (GKG).

Potensi besar ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat menjadi tulang punggung ekonomi pasca migas apabila dikelola secara berkelanjutan dan produktif. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas (Kementan, 2023). Menurut (Salsabila & Wulandari, 2025) dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah pertanian memiliki peran strategis karena berkontribusi terhadap penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan ketimpangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis sumber daya lokal (*local-based development*), yang menekankan pemanfaatan potensi domestik sebagai dasar pengembangan ekonomi daerah (Todaro & C.Smith, 2020). Dengan mengoptimalkan sektor pertanian pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro berpotensi dapat mengurangi kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Solow-Swan pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi yang berperan sebagai pendorong utama dalam memperluas kapasitas produksi suatu perekonomian (Hasibuan, Rahmanta, & Ayu, 2022). Beberapa penelitian terdahulu Salsabila & Wulandari (2025) dan Suryanto, Kusnandar, & Antriyandarti (2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan tenaga kerja, luas lahan, investasi dan akses teknologi berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan kerangka teoritis, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada variabel luas lahan dan investasi pertanian sebagai faktor determinan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, mengingat signifikansi pengaruhnya yang telah dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Meskipun demikian di tingkat daerah khususnya Kabupaten Bojonegoro, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis pengaruh luas lahan dan investasi sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin masih relatif terbatas. Disisi lain daerah ini menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan pada sektor pertambangan serta kebutuhan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Mengingat karakteristik perekonomiannya yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi PDRB yang sangat besar namun tidak diiringi dengan tingkat penurunan kemiskinan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor padat modal belum sepenuhnya mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan kondisi

tersebut penulis terdorong untuk mendalami tentang “Analisis Pengaruh Luas Lahan dan Investasi Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah luas lahan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?
3. Apakah luas lahan dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini disusun secara selaras dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menganalisis pengaruh luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis pengaruh investasi sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro
3. Menganalisis pengaruh luas lahan dan investasi sektor pertanian secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan empiris dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan luas lahan dan alokasi investasi pertanian,

sebagai upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya kajian empiris dalam bidang ekonomi regional dan pembangunan, khususnya mengenai pengaruh faktor produksi sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di tingkat daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk mengarahkan fokus analisis secara lebih spesifik penelitian ini penelitian ini terbatas pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis luas lahan dan investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro, dengan periode observasi dari tahun 2009 hingga 2024. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari BPS Kabupaten Bojonegoro.
2. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial maupun simultan. Dengan pengujian kecocokan model melalui nilai koefisien determinasi (R^2).